

## Macet Parah Imbas Peninggian Jalan Benda Raya Tangsel

TANGSEL (IM)- Kemacetan panjang terjadi di Jalan Benda Raya, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (15/5). Laju kendaraan tersendat nyaris tak bergerak baik dari arah Pamulang menuju Bundaran Maruga, maupun sebaliknya.

Pantauan sekira pukul 08.00 WIB, laju kendaraan sepeda motor dan mobil nyaris berhenti total di kedua jalur itu. Kemacetan kian parah seiring dengan tingginya volume kendaraan yang melintas pada jam sibuk.

"Biasanya nggak separah ini," keluh seorang pemotor ojek online.

Petugas dari Dinas Perhubungan dibantu personel kepolisian berupaya meminimalisir dampak kemacetan. Sejumlah pemotor pun dibiarkan

memasuki akses jalan gedung balai kota guna menembus ke wilayah perkampungan.

Kemacetan itu sendiri dipicu adanya peninggian jalan sepanjang total 120 meter di depan Gedung City Galeri hingga depan Sekolah Waskito. Persiapan pengerjaannya mulai dilakukan sejak kemarin.

"Jadi peninggian jalan ini panjangnya kurang lebih sekitar 120 meter lari dengan lebar sekitar 7 meter, dan peninggian mencapai 40 sampai 45 senti. Jadi peninggian jalan ini sebagai upaya dari Pemkot Tangsel untukantisipasi agar setiap hujan tak terjadi lagi genangan," terang Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ahmad Fatullah. ● pp

## Warga Terdampak Banjir Lahar Dingin di Sumbang Dipertimbangkan Direlokasi

PADANG (IM)- Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang turun langsung meninjau lokasi terdampak di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, menyampaikan relokasi menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan parah dan berada di daerah rawan bencana.

"Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi, kalau ada relokasi maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun," jelas Suharyanto.

Langkah ini sebagai upaya memastikan keselamatan dan keamanan warga, serta memberikan kesempatan memulai

kembali kehidupan dengan lebih tenang.

Bila relokasi tidak dimungkinkan, kata Suharyanto, maka akan diberikan bantuan untuk perbaikan rumah. Dengan rincian di antaranya Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.

Sampai saat ini upaya pemulihan terus dilakukan Pemerintah dengan sejumlah stakeholder lainnya. "Target penanganan darurat adalah 14 hari, namun berbagai upaya akan terus dilakukan untuk pemulihan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata Suharyanto.

Data terbaru korban per 14 Mei 2024, pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang dan 35 orang masih dalam pencarian. Akibat banjir lahar dingin ini, sebanyak 1.543 KK terdampak dan 33 orang mengalami luka-luka.

Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data. ● pra



### TRADISI MANTEN TEBU DI PABRIK GULA PT.RMI BLITAR

Factory Manager PT. RMI Heri Widarmanto (kedua kanan) bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Dicky Cobandono (tiga kiri) melemparkan mantan tebu lanang (pria) dan tebu wadon (perempuan) ke mesin produksi saat prosesi mantan tebu yang merupakan tradisi penanda dimulainya masa produksi gula di pabrik gula PT. Rejoso Manis Indo (RMI) Blitar, Jatim, Rabu (15/5). Prosesi tersebut sebagai perwujudan rasa syukur petani atas hasil panen yang melimpah.

## Kegiatan Rawan Penyelewengan, Kejari Awasi Pejabat Pemkot Cilegon

Ini sejarah baru, kita apresiasi Ibu Kajari Cilegon karena selama ini MoU ini hanya dilakukan dengan Kajari dan Wali Kota saja, tetapi saat ini langsung dengan OPD-OPD jadi saya senang adanya perhatian langsung dari Kejari. Apalagi Kota Cilegon ini jadi kota proyek percontohan dari BPKP, kata Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian.

**CILEGON (IM)-** Kearsakan Negeri (Kejari) Kota Cilegon siap mengawasi dengan memberikan pendampingan sejumlah kegiatan baik OPD, Kec-

amatan dan BUMD di Kota Cilegon yang dinilai rawan penyelewengan.

Hal itu terungkap adanya nota kesepahaman atau MoU antara Kejari Cilegon dan

Pemkot Cilegon di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu (15/5).

Kepala Kejari Kota Cilegon, Diana Wahyu Widayanti mengatakan, adanya pendampingan di setiap kegiatan melalui nota kesepahaman dengan OPD-OPD dan BUMD Cilegon itu upaya mengantisipasi adanya penyelewengan dari pejabat Cilegon.

"Ini migrasi risiko terhadap upaya pencegahan tidak pidana korupsi dan risiko keperdataan dan risiko tata usaha. Fokusnya adalah pendampingan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dinilai rawan penyelewengan atau ada keraguan dan keperdataan gugatan," kata Diana.

"Jadi kita ini sifatnya bu-

kan mencari temuan, ini berbeda dengan ruang lingkup pidana hanya pendampingan dan kita membantu mereka agar tidak menyeleweng," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menyampaikan, adanya kerjasama ini merupakan sejarah yang perlu diapresiasi. Karena selama ini hanya sebatas antara Kajari dengan Walikota, namun saat ini bisa langsung dengan semua OPD, bahkan BUMD di Cilegon.

"Ini sejarah baru ya, kita apresiasi Ibu Kajari karena selama ini MoU ini hanya dilakukan dengan Kajari dan Wali Kota saja, tetapi saat ini langsung den-

gan OPD-OPD jadi saya senang adanya perhatian langsung dari Kejari. Apalagi Kota Cilegon ini kan jadi kota proyek percontohan dari BPKP, makanya kita akan membuat laboratorium manajemen risiko dari 98 kota di Indonesia Kota Cilegon salah satunya," kata Helldy.

Untuk itu, sebagai mitigasi pencegahan dirinya ingin menjadikan kota Cilegon yang berprestasi dan mengurangi hal-hal yang berbaur negatif.

"Semoga adanya perjanjian ini bisa meminimalisir dan terkontrol dengan baik, sehingga hal-hal yang berbaur negatif di Cilegon tidak ada lagi," harapnya. ● pra

## Abaikan Teguran Satpol PP, Aktivitas Galian Tanah di Tigaraksa Disegel

**TANGERANG (IM)-** Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang kembali melakukan penyegelan aktivitas kupasan tanah atau cut and fill yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Tigaraksa.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan, penyegelan tersebut sebagai tindak lanjut adanya aduan dan keluhan masyarakat terkait aktivitas galian tanah tersebut.

Masyarakat merasa terganggu dengan ceceran tanah yang berasal dari mobil-mobil pengangkut tanah yang berasal dari lokasi tersebut.

"Ceceran tanah dari truk pengangkut yang keluar masuk lokasi (cut and fill) tersebut sangat mengganggu dan membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan karena menyebabkan jalan licin," katanya, Rabu (15/5).

Agus menjelaskan, aktivitas galian tersebut berada di dua desa, yakni Desa Pete dan Desa Telagari. Akses keluar masuk aktivitas berada di Desa Pete dan kupasan tanahnya terdapat di Desa Tegalsari.

"Selain tanah yang berceceran, aktivitas truk tanah yang keluar masuk proyek dan melintas di jalan raya di luar jam operasional

juga sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan," ungkapnya.

Menurut Agus, penyegelan ini dilakukan lantaran pihak pengelola tidak mengindahkan peringatan yang sudah pernah diberikan, untuk tidak melakukan aktivitas kupasan tanah.

"Kami sudah coba berkomunikasi kepada pihak pengelola aktivitas kupasan tanah tersebut, namun dari mereka tidak ada itikad baik. Jadi kami melakukan langkah untuk menyegel aktivitas kupasan tanah tersebut hingga empat alat berat yang berada di lokasi juga langsung disegel," ucapnya.

Terakhir, Agus mengimbau kepada pengusaha galian tanah agar mematuhi peraturan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Segala bentuk aktivitas galian tanah tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah berjalur Seribu Industri ini.

"Kita tidak akan segan-segan melakukan penindakan segala aktivitas yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas galian tanah ilegal dapat melaporkannya kepada pihak kami agar segera ditindak," pungkasnya. ● pp

## Pembuatan Surat Rekomendasi UMKM di Kota Tangerang Gratis

**TANGERANG (IM)-** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang, Banten memastikan pembuatan surat rekomendasi UMKM tidak dikenakan biaya atau gratis.

Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi di Tangerang, mengatakan surat rekomendasi UMKM biasanya dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran merek secara mandiri atau dengan biaya sendiri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk melakukan permohonan surat rekomendasi UMKM, pelaku usaha dapat memprosesnya secara luring di kantor Disperindagkop UKM di

Gedung Cisadane di Jalan KS Tubun Nomor 1 Kota Tangerang.

Pelayanan dibuka setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Informasi lebih lanjut, pelaku usaha dapat menghubungi nomor 021-5572-5951 atau Instagram di akun @Indagkopukm\_tangerangkota.

"Layanan ini gratis, pelaku usaha bisa datang atau melakukan pengajuan permohonan melalui layanan yang kami siapkan," kata dia, kemarin.

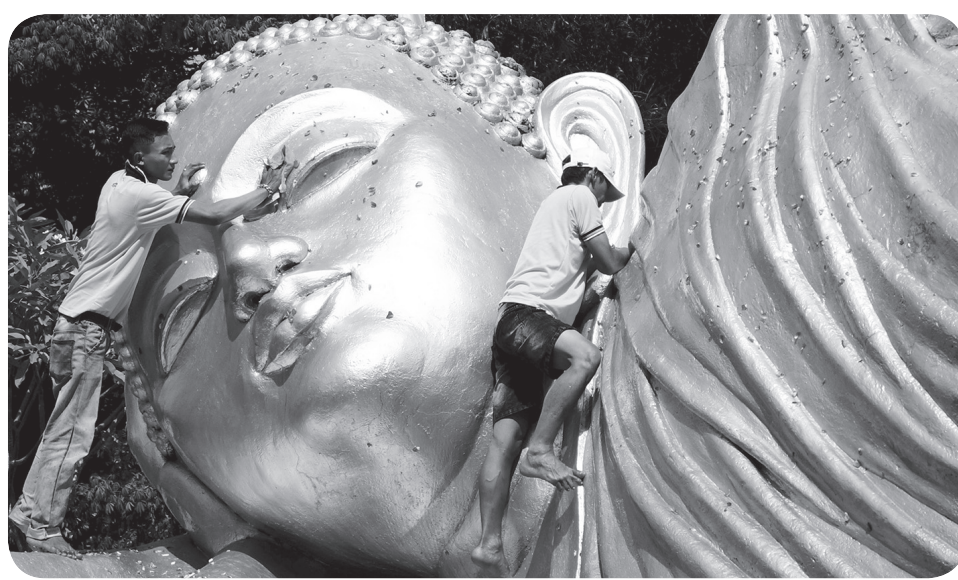
Dokumen yang harus dilampirkan, di antaranya fotokopi KTP pemohon, fotokopi NIB, logo merek yang akan didaftarkan, foto produk yang akan didaftarkan, foto tempat usaha, deskripsi jenis usaha dan kelas produk yang akan didaftarkan (kelas produk

dapat dilihat pada <https://skm.dgip.go.id/>).

Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang dengan contoh surat dapat diunduh melalui link [bit.ly/contohnya23](https://bit.ly/contohnya23)

Persyaratan permohonan surat rekomendasi UMKM adalah warga Kota Tangerang dan minimal usaha sudah berjalan satu tahun. Kriteria usaha termasuk dalam usaha mikro sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

"Semua dokumen yang harus dilampirkan disampaikan langsung ke Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Disperindagkop UKM Kota Tangerang," katanya. ● pp



### PEMBERSIHAN PATUNG BUDDHA TIDUR DI MOJOKERTO

Warga membersihkan patung Buddha tidur di area Maha Vihara Mojopahit Bejjong, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, Jatim, Rabu (15/5). Tradisi membersihkan patung Buddha tidur yang berukuran panjang 22 meter, lebar enam meter dan tinggi 4,5 meter tersebut merupakan rangkaian peringatan menjelang Hari Raya Waisak 2568 BE.



### PROGRAM UMKM NAIK KELAS TAHUN 2024 DI KOTA BOGOR

Pelaku UMKM Kota Bogor menawarkan produknya kepada pengunjung saat acara UMKM Naik Kelas tahun 2024 di Aula DPRD Kota Bogor, Jabar, Rabu (15/5). Program UMKM Naik Kelas tahun 2024 yang diselenggarakan Pemprov Jabar bersama Pemkot Bogor diikuti 130 pelaku UMKM Kota Bogor dan berlangsung selama 8 bulan.

## Antrean Membeludak, Pemohon E-KTP di Disdukcapil Pandeglang Meningkat

**PANDEGLANG (IM)-** Pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-EI) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, membludak sejak tiga bulan terakhir.

Mereka berduyun-duyun rela antre terjadi sejak pagi hingga siang di Disdukcapil Kabupaten Pandeglang. Para pemohon, yang mayoritas adalah pemilih pemula jelang Pilkada serentak 2024, rela menunggu berjam-jam untuk membuat KTP-EI sebagai dokumen administrasi kependudukan mereka yang pertama kali.

Plt Kasubag Umum Administrator Database Kependudukan Disdukcapil Pandeglang, Samsudin mengungkapkan bahwa sebagian besar warga yang datang ke Disdukcapil Pandeglang membuat E-KTP sekaligus mendaftarkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

kerjanya, Rabu (15/5).

"Memang pengunjung setiap tahunnya selalu seperti ini ramai, karena pemohon itu kebanyakan mau kerja ke luar Pandeglang, dan itu semua mereka pemula pembuatan Adminduk," sambungnya.

Samsudin menjelaskan, selain membuat KTP-EI, banyak warga yang datang untuk memperbarui identitas nama yang perlu diupdate atau mengalami kendala pada KTP maupun data kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK) yang harus sesuai.

"Karena mulai dari NIK kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya itu harus sama dengan E-KTP, makanya itu banyak masyarakat datang yang ingin dirubah. Selain itu ada juga ingin menghapus nama gelarnya, ya banyak lah bervariasi," katanya.

Menurut Samsudin, warga Pandeglang yang sudah mencapai usia 17 tahun harus memiliki tiga jenis dokumen kependudukan: E-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. ● pra